



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

- Nama** : Ferian Anggara
- Jabatan** : KETUA PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI TEKNIK GEOLOGI
- NHK** : 962759

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.224.450.000**

- Tanah Seluas 100 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI
Rp. 550.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/35 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
- Tanah Seluas 222 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI
Rp. 22.200.000
- Tanah Seluas 1.254 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI
Rp. 125.400.000
- Tanah Seluas 816 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI
Rp. 81.600.000
- Tanah Seluas 1.332 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI
Rp. 133.200.000
- Tanah Seluas 747 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI
Rp. 112.050.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **370.000.000**

- MOBIL, MAZDA MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
- MOTOR, HONDA SUPER CUP SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000



3. MOTOR, VESPA SCOOTER Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
50.000.000
4. MOTOR, HONDA DEX SOLO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
70.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	599.364.781
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	11.027.682
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.204.842.463
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.204.842.463

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.